

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang aksi kolektif yang dilakukan Forum Komunikasi Warga Korban Konservasi Pamurbaya (FK3P) karena penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan apa motif aksi kolektif petani, menjelaskan strategi yang digunakan petani serta mengetahui solusi dari pemerintah terkait aksi kolektif petani tambak pamurbaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menguraikan fenomena lapangan serta menggunakan metode analisis dekriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan narasumber kunci yakni Koordinator Aksi, DPRD Kota Surabaya dan Dinas terkait sebagai wakil dari Pemerintah Kota Surabaya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori nilai tambah dari Neil J Smelser untuk menganalisa aksi kolektif yang dilakukan kelompok FK3P. Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan penggunaan fasilitas situasional sebagai strategi yang dilakukan kelompok FK3P melalui kerjasama dengan pihak eksternal yang dilakukan koordinator aksi yaitu dengan media massa sebagai cara untuk memaksimalkan penyebaran dukungan publik terhadap korban korban konservasi melalui pemberitaan dan calon legeslatif sebagai pemanfaatan kekuasaan di lembaga legeslatif. Disisi internal peran kepemimpinan aksi menjadi penting untuk memobilisasi massa dan mengatur strategi aksi kolektif yang akan dilakukan. Namun, respon Pemerintah kota Surabaya tetap diam sebagai langkah untuk meredam aksi kolektif yang dilakukan petani tambak.

Kata Kunci : Aksi Kolektif, Kepemimpinan, Lahan Konservasi, Konflik

ABSTRACT

This particular research examines the collective action of the Pamurbaya Conservation Victim Communication Forum (FK3P) towards the stipulation of the Regional Regulation Number 12 of 2014 changes to Regional Regulation No. 3 of 2007 regarding the Surabaya Spatial/Urban Planning. The research was conducted to find out the background and the motives of the collective action of these fish farmers, as well as to explain the strategies used by the farmers and to seek for the solutions from the government regarding the collective action of Pamurbaya farmers.

This research applied a qualitative approach to describe the actual phenomena and descriptive analysis methods to describe and explain the main problem. The data was retrieved through direct interview method with key informants such as the Action Coordinator, Surabaya City Council Members and related Offices and Agencies as representatives of the Surabaya City Government

The Neil J Smelser's value added theory was applied in this research to analyze the collective action of the group. The study found the use of situational facilities as a strategy conducted by the FK3P group through collaboration with external parties by the action coordinator with mass media as a way to maximize the spread of public support for the victims of the conservation regulation through news outlets and that legislative candidates to use the matter as a means of power in the legislative office. On the internal side, the leadership role of the action becomes important to mobilize people and to set a strategy for the collective action. However, the response of the Surabaya City Government is to remained silent towards the issue as a step to reduce the collective action of the fish farmers.

Keywords: Collective Action, Leadership, Conservation Land, Conflict